

# PEMIKIRAN-PEMIKIRAN ALTERNATIF TERHADAP PEMBANGUNAN

Yuni Prihadi Utomo  
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

## Abstract

*Development is one of urgent concept in this age. The problem of development is wide and complicated, therefore development often become underdevelopment in reality. In this case, the writer provides four idea of development; there are International Dependence Approach, Neo Structural Thought, New Structural Transformation Model from Berkeley, and Political Approach of Development. From those thoughts, the writer gives final notes that development is too complex if it is discussed only from economic sector. Development is a continuous process improvement of a society on such ideology, political, social and cultural system that entirely direct to better life and more humane.*

**Keywords:** *international dependence, development concept, an effective development state, core sector, structural transformation*

## PENDAHULUAN

Pembangunan adalah satu di antara konsep-konsep paling mendesak di zaman kita sekarang ini. Ia memancing pertanyaan-pertanyaan sulit tentang **nilai-nilai, teknik-teknik, dan pilihan-pilihan**. Pembangunan memunculkan kembali pertanyaan klasik tentang hakikat "masyarakat yang baik", dan juga masalah siapakah yang harus **menentukan isi dan tujuan masyarakat**. Karena masalah-masalah itu luas dan sulit, mudahlah orang mengaburkannya dalam generalisasi, menggunakan istilah *pembangunan* sebagai eufemisme untuk perubahan, modernisasi, atau pertumbuhan. Kendati demikian, pembangunan lebih rumit daripada yang tersaran dalam kata-kata tersebut (Bryant dan White, 1987:3; karakter tebal oleh penulis).

Sering yang terdengar adalah pembangunan tetapi yang terlihat ialah realitas kurangnya pembangunan (*underdevelopment*). Kemiskinan dengan beberapa seginya merasuk makin dalam; buruh tani terus bergulat mempertahankan hidupnya menghadapi ketiadaan tanah milik; gubuk hunian liar menjamur dari hari ke hari di daerah-daerah perkotaan. Terjepit di antara pemutar uang dan pemilik tanah, bergantung pada musim dan cuaca, dan dengan akses yang terbatas atas benih, air dan hewan pembantu, buruh tani harus menimbang secara teliti risiko setiap langkah dalam suatu lingkungan hidup yang memang padat dengan risiko. Ukuran agregat pertumbuhan dalam wujud GNP dan harapan hidup (*life expectancy*) serta dalam wujud tingkat kematian bayi, bercerita tentang perkembangan yang timpang, makin hebatnya penderitaan pihak-pihak tertentu, penumpukan hutang, lingkungan yang makin kurus, dan kesenjangan yang bertambah-tambah. (Bryant dan White, 1987:5)

Makalah mencoba menyajikan empat pemikiran mengenai pembangunan, yakni Pendekatan Ketergantungan Internasional, Pemikiran Neostrukturalis, Model Transformasi Struktural Baru dari Berkeley dan Pendekatan Politik Mengenai Pembangunan, dengan harapan lebih memperluas sudut pandang dan wawasan kita di dalam menghayati makna dan permasalahan pembangunan.

## **PARADIGMA KETERGANTUNGAN INTERNASIONAL**

Paradigma Ketergantungan Internasional menghubungkan keberadaan dan kelanggaran Dunia Ketiga kepada evolusi sejarah hubungan yang sangat tidak seimbang antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin dalam suatu sistem kapitalis internasional (Todaro, 2000:91).

Menurut Paul Baran (Arief dan Sasono, 1984:17-22), interaksi ekonomi internasional, di mana faktor modal bergerak dari negeri yang produktivitas batas (*marginal productivity*) faktor modalnya rendah, ke negeri yang produktivitas batasnya tinggi atau diharapkan akan tinggi untuk menuju keseimbangan pada keseluruhannya, tidak terjadi. Meskipun terjadi pergerakan faktor modal antarnegara (yaitu dari negara maju ke negara miskin), pergerakan ini hanyalah bertujuan untuk menyedot keuntungan negeri miskin. Keuntungan yang disedot ini ternyata bagian terbesar dari pertambahan pendapatan, yang

diakibatkan adanya investasi asing sebagai akibat pergerakan faktor modal itu sendiri.

Naiknya pendapatan nasional di negara miskin sebagai akibat adanya investasi asing ini, tidak dinikmati oleh sebagian besar rakyat di negara itu karena adanya kepincangan dalam distribusi pendapatan. Pihak yang menikmati keuntungan yang ditimbulkan oleh investasi asing ini hanya terdiri dari segelintir kecil anggota masyarakat dan keuntungan ini diperoleh dari hasil suatu proses eksploitasi.

Efek ekonomi dalam pengertian menaikkan kesejahteraan sebagian besar rakyat di negara-negara miskin tidak terjadi dengan masuknya modal asing ke negara miskin tersebut. Sistem ini bahkan menggeser kebiasaan sosial yang ada pada masyarakat di negara miskin. Kontrak transaksi berdasarkan faktor pasar mengganti dan mendesak hubungan paternalistik yang terdapat sejak berabad-abad di negara ini. Sistem tersebut juga menimbulkan perubahan orientasi rakyat di negara ini, yaitu dari berorientasi kepada berkecukupan dan pemenuhan pasaran dalam negeri, ke produksi untuk memenuhi pasaran luar negeri. Orientasi baru ini sekaligus membuat sistem ekonomi rakyat di negara ini dikaitkan langsung dengan sistem ekonomi kapitalis di luar negeri dengan berbagai gejolaknya.

Sebenarnya penggantian sistem paternalistik (sebagai suatu sistem masyarakat feodal atau semifeodal) dengan sistem kapitalis yang didasarkan pada rasionalis pasar, dapat merupakan langkah utama dalam transformasi masyarakat ke arah kemajuan dan peradaban yang tinggi seperti yang dialami di Eropa Barat. Tetapi apa yang terjadi ialah bahwa penerapan nilai komersial dalam tata hubungan sosial pada masyarakat feodal atau semifeodal, justru telah memperhebat proses eksploitasi terhadap golongan lemah yakni massa rakyat. Proses eksploitasi dalam sistem kapitalis ini diiringi pula dengan proses korupsi dan ketidakadilan dalam setiap tingkat struktur pemerintahan yang mengabdikan kepada kepentingan pemilik modal dari sistem kapitalis internasional.

Kepincangan sosial sebagai akibat dari proses eksploitasi dengan masuknya modal asing ke negara-negara miskin ini telah menimbulkan reaksi-reaksi sekelompok kalangan kelas menengah dalam masyarakat yaitu sebagian dari golongan terpelajar dan sebagian dari golongan pengusaha nasional. Kedua golongan ini melihat dominasi asing sebagai sesuatu yang perlu disingkirkan.

Tetapi kedua golongan ini ternyata tidak mampu mengadakan perubahan. Ketidakmampuan mereka ini dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Kedua golongan ini pada hakikatnya merupakan golongan yang relatif lemah disebabkan oleh keterbelakangan dan kemiskinan negara tempat mereka berada. Mereka tidak diwarisi kekuatan ekonomi yang dapat melahirkan kepercayaan diri untuk memimpin masyarakat. Cengkraman sistem feodal yang berabad-abad membuat mereka masih tetap berasimilasi dengan nilai politik, moral dan kebudayaan dari pihak yang berkuasa.
2. Oleh karena pada hakikatnya golongan kelas menengah ini masih berorientasi kepada nilai-nilai yang dianut oleh pihak penguasa dan masih mempunyai vested interest dalam situasi status quo yang berjalan, mereka tidak dapat menerima ajakan untuk melakukan suatu revolusi sosial. Akibatnya mereka tidak ingin menyatukan diri dan membentuk barisan dengan golongan bawah sehingga dapat merupakan kelompok kuat untuk melaksanakan gerakan antifeodal dan melakukan perubahan mendasar dalam stelsel sosial.

Sebagai akibat dari ketidakmampuan golongan kelas menengah untuk melakukan pendobrakan terhadap proses eksploitasi yang dilakukan oleh modal asing dan perangkat sistem yang menyertainya, maka pada akhirnya mereka terpaksa melakukan kerja sama dengan pemilik modal asing dan penguasa lokal yaitu golongan feodal. Mereka merasa bahagia menjadi kelompok yang terasing dari sebagian besar bangsanya yang melarat, yang merupakan kelompok lapisan terbawah dalam strata sosial. Pihak pengusaha nasional tampil menjadi partner pemodal asing. Partner bukan dalam pengertian ikut serta dalam pemilikan perusahaan asing, tetapi bertindak selaku pelengkap untuk memudahkan operasi perusahaan-perusahaan asing. Sebagai pelaku pelengkap pada hakikatnya para pengusaha ini hanya menerima sebagian kecil saja dari nilai tambah kekayaan nasional yang dieksploitasi oleh para pemodal asing, meskipun nilai tambah yang mereka peroleh jauh lebih besar dari buruh pribumi yang dipekerjakan dalam perusahaan asing dan jauh lebih besar dari nilai tambah yang diperoleh produsen-produsen kecil komoditi ekspor yang terdiri dari massa rakyat pribumi. Mereka pada akhirnya turut memperkuat aliansi golongan kapitalis asing dengan golongan

pribumi. Akibatnya, ciri-ciri terburuk dari kapitalisme dan feodalisme bersatu dan timbul menjadi penghalang utama dalam pembebasan massa rakyat untuk meraih perkembangan ekonomi dan sosial.

Kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di atas landasan struktur dan stelsel sosial seperti dikemukakan di atas, ditumpukan pada program pertumbuhan produksi untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Oleh karena pertumbuhan produksi di sektor pertanian tradisional tidak dapat diharapkan sebagai akibat padatnya penduduk di sektor ini yang produktivitas-batas buruh cenderung mendekati nol atau sama dengan nol, maka kebijaksanaan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengutamakan sektor industri dan sektor ekstraktif.

Sektor industri ternyata tumbuh secara tidak sehat, dilihat dari sudut perkembangan ekonomi rakyat. Industri yang tumbuh pesat hanyalah industri yang memproduksi barang kebutuhan elite oleh karena tingkat permintaan efektif yang ada dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga industri yang memproduksi barang mewah merupakan industri yang lebih menguntungkan. Sementara itu industri barang konsumsi lainnya yang juga turut berkembang, yang banyak merupakan hasil usaha modal asing atau campuran dengan pihak domestik, telah mematikan industri rakyat yang selama ini memproduksi barang sejenis. Matinya industri rakyat ditambah dengan kecilnya nilai tambah yang ditimbulkan oleh industri untuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, oleh karena banyaknya pembelian dan pembayaran yang harus dilakukan ke luar negeri untuk menunjang operasi industri ini, merupakan biaya yang harus dibayar oleh negara-negara miskin. Selain itu, industri yang berkembang mengarah pada terbentuknya unit-unit monopolistis atau oligopolistis yang dikuasai oleh sekelompok orang. Ditinjau dari sudut perkembangan ekonomi rakyat, konsentrasi kekuasaan ekonomi di bidang industri membuat pertumbuhan industri lebih tidak sehat.

Para industrialis yang beroperasi dalam situasi monopolistis dan oligopolistis dengan sendirinya memperoleh tingkat keuntungan di atas normal. Tingkat keuntungan di atas normal ini selain dikirim ke luar negeri oleh para pemilik modal asing, sebagian besar juga tidak digunakan untuk investasi di bidang-bidang yang besar efeknya terhadap ekonomi rakyat. Keuntungan di atas normal ini banyak digunakan untuk membiayai pembelian konsumsi mewah, seperti

pembangunan rumah mewah yang eksklusif, pembelian tanah-tanah luas, pembiayaan kegiatan yang lukratif sifatnya, peminjaman uang dengan bunga tinggi, pembiayaan kegiatan spekulasi, dan tak kalah pentingnya ialah menumpuk kekayaan di luar negeri. Seluruh kegiatan menjadi tidak sehat, karena investasi tidak diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang berefek luas terhadap penyerapan tenaga kerja.

Oleh karena sektor industri yang berkembang tidak berorientasi pada sektor pertanian di dalam negeri dalam bentuk menimbulkan permintaan akan bahan mentah pertanian, tetapi sangat berorientasi ke luar negeri dari segi input, ditambah pula dengan kebijaksanaan harga barang industri yang ditimbulkan oleh monopolis dan oligopolis industri, maka sektor industri di negara miskin pada hakikatnya memaksa sektor pertanian untuk tidak berkembang dan berputar-putar di sekitar situasi subsisten saja.

Sektor ekstraktif sebagai sektor pilihan lain untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi, oleh karena adanya kendala di bidang permodalan dan teknologi produksi di pihak pengusaha domestik, telah dibuka secara besar-besaran kepada pengusaha asing. Akibatnya kekuasaan modal dan penguasaan teknologi, ditambah pula dengan penguasaan jaringan pemasaran internasional, pihak asing tampil sebagai pihak yang mendominasi nilai tambah sektor ini. Efek positifnya dalam bentuk penciptaan pengganda pendapatan rumah tangga maupun penyerapan tenaga kerja ternyata relatif kecil, walaupun secara mutlak pertumbuhan nilai tambah sektor ekstraktif ini merupakan salah satu komponen paling utama dalam pertumbuhan pendapatan nasional.

Di dalam proses dan pertumbuhan ekonomi seperti yang disebutkan di atas, kegiatan modal asing dipermudah oleh adanya jaringan kerja sama antara pemodal asing, pengusaha domestik dan elite yang berkuasa. Elite berkuasa adalah golongan komprador yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan asing. Dilihat dari sifat kerja samanya, maka kerja sama di antara pihak asing, pengusaha domestik dan elite yang berkuasa, pada hakekatnya sama dengan kerja sama yang terjalin di antara penjajah asing, pengusaha domestik dan kalangan menengah lainnya serta golongan feodal pada zaman penjajahan dahulu. Sifat kerja sama ini adalah sama, oleh karena keduanya berdiri di atas landasan yang sama, yaitu mempertahankan

suatu status quo yang sama. Status quo itu adalah struktur sosial dan stelsel sosial yang ada. Dan kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan harus tidak menggoyahkan status quo ini dan malah dijuruskan untuk memperkuatnya.

### **PEMIKIRAN NEOSTRUKTURALIS (Arief, 1993:47-50)**

Aspek utama yang sangat dipentingkan dalam pemikiran neostrukturalis ialah aspek yang berkaitan dengan peranan pemerintah dalam proses pembangunan. Dalam hal ini ditekankan bahwa intervensi pemerintah tidak menjamin berlangsungnya suatu proses pembangunan yang dinamis untuk kepentingan masyarakat luas. Hal ini dikarenakan dalam tubuh pemerintah telah berkembang suatu mentalitas yang destruktif terhadap proses pembangunan yang hakiki. Mentalitas inilah yang bertanggung-jawab terhadap distorsi-distorsi harga, sebagai akibat meluasnya pemberian hak-hak istimewa (*privileges*) kepada kelompok aktor-aktor ekonomi tertentu. Pemberian hak-hak istimewa kemudian menimbulkan terbentuknya konsentrasi kekuasaan ekonomi di tangan sekelompok orang yang dengan kekuasaan ekonomi ini menjelma menjadi monopolis-monopolis dan oligopolis-oligopolis. Akibatnya pembentukan harga komoditas berlangsung dalam suasana ketidaksempurnaan pasar yang luar biasa. Pemikiran neostrukturalis mutlak menghendaki adanya upaya untuk memecah tembok-tembok konsentrasi kekuasaan ekonomi ini sehingga mekanisme pasar yang sejati berjalan dalam ekonomi. Akibat pemberian hak-hak istimewa, maka melembagalah mentalitas penguasa yang lebih menginginkan terus hidup dari rente ekonomi. Aktor-aktor ekonomi yang meresapi *rentier mentality* ini tidak merupakan sumber kelas pengusaha yang tangguh. Dan mereka inilah yang merupakan pendukung struktur kekuasaan yang telah menyuburkan kesempatan mereka untuk meraih rente ekonomi secara leluasa.

Upaya pokok yang pertama yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pemikiran neostrukturalis ialah melakukan suatu proses rekonstruksi struktur kekuasaan untuk membentuk suatu pemerintahan yang disebut *an effective development state*. Kondisi-kondisi utama yang harus dipenuhi oleh pemerintahan ini ialah adanya kelas penguasa yang bebas dari kepentingan pihak mana pun kecuali kepentingan rakyat banyak. Anggota kelas penguasa ini harus punya

sikap budaya yang sanggup membebaskan diri godaan untuk memperkaya diri sendiri melalui kekuasaan yang dipegangnya. Upaya pokok yang pertama ini ialah upaya rekonstruksi politik.

Upaya pokok yang kedua yang berbarengan dengan rekonstruksi kekuasaan ialah pelaksanaan reformasi agraria dan restrukturisasi sosial untuk tujuan pembentukan prakondisi-prakondisi sosial yang diperlukan dalam memerangi kemiskinan absolut. Program-program ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan program-program sosial lainnya yang relevan untuk mempertahankan kelanggengan prakondisi-prakondisi sosial yang tersebut di atas merupakan komponen-komponen utama dalam kebijaksanaan sosial (*social policy*).

Upaya pokok yang ketiga dalam merealisasi pemikiran pembangunan dengan pendekatan neostrukturalis ialah program industrialisasi yang otonom (*autonomous industrialization*). Program industrialisasi yang otonom ialah program industrialisasi yang didukung oleh kekuatan basis teknologi produksi di dalam negeri yang diadaptasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan *factor endowment* di dalam negeri. Dalam hal ini transformasi teknologi bukan dilakukan dengan mentransfer mentah-mentah teknologi asing, tetapi dengan mengadaptasinya selain daripada mengembangkan basis teknologi sendiri. Program industrialisasi ini juga dijalankan secara konsekuen terkait dengan sektor primer sebagai penyedia bahan-bahan baku sehingga orientasi industri dari segi bahan baku terletak di dalam negeri. Hal ini secara tegas dilakukan demi upaya untuk menghindarkan ketidak seimbangan yang mencolok dalam distribusi dan pemanfaatan stok modal yang ada. Sementara itu, penguasaan sektor industri haruslah berada di tangan pihak nasional. Sifat dan bentuk program industrialisasi seperti ini, dipercayai tidak akan menjuruskan suatu negara berkembang mengalami masalah defisit perkiraan berjalan yang berlarut-larut yang pemecahannya malah menimbulkan lingkaran tidak berujung. Untuk mengurangi defisit transaksi berjalan, ekspor diperlukan tetapi ekspor ini memerlukan impor.

Secara menyeluruh, elemen pokok pemikiran neostrukturalis di bidang ekonomi ialah pengembangan pasaran dalam negeri. Pasaran dalam negeri atau permintaan efektif di dalam negeri yang harus menjadi penentu arah pembangunan bukan pasaran eksternal. Ekspor merupakan konsekuensi pertumbuhan di dalam negeri dan keunggulan



komparatif dalam ekspor ditentukan oleh produktivitas yang tinggi bukan biaya buruh yang super rendah.

Akhirnya, pemikiran neostrukturalis mengenai pembangunan juga sangat menitikberatkan pembentukan suatu sistem sosial-budaya yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia atau *human capital* yang berkualitas tinggi, tangguh dan berwatak sosial. Lembaga-lembaga pendidikan bukan hanya menjadi pusat-pusat pembentukan manusia yang punya kemampuan teknis tetapi juga menjadi pusat-pusat pembentukan manusia yang berwatak yang menjunjung tinggi karya-karya yang bersifat manusiawi atau kerakyatan.

### **MODEL TRANSFORMASI STRUKTURAL BARU DARI BERKELEY (Arief, 1993:51-54)**

Proses perkembangan ekonomi suatu negara telah sering diartikan atau dipahami sebagai suatu proses transformasi struktural. Proses transformasi struktural ini ialah dalam bentuk terjadinya pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan kemudian ke sektor jasa-jasa. Dalam hal ini proses perkembangan ekonomi ditandai oleh adanya perubahan dalam kontribusi sektoral terhadap *output* nasional sebagai akibat terjadinya pergeseran tenaga kerja nasional dari sektor pertanian ke sektor industri dan kemudian ke sektor-sektor jasa-jasa. Sektor jasa-jasa dianggap sebagai tahap tertinggi dalam proses perkembangan ekonomi.

Pada waktu akhir-akhir ini telah timbul suatu pertanyaan besar di kalangan sarjana dan peneliti ekonomi di Amerika Serikat mengenai apakah ekonomi jasa ini dapat memecahkan persoalan ekonomi Amerika Serikat terutama persoalan ekonomi Internasionalnya. Ternyata defisit perdagangan produk manufaktur telah tidak dapat diimbangi dengan hasil perdagangan produk-produk jasa-jasa. Dominasi sektor jasa dalam ekonomi Amerika Serikat dalam kesempatan kerja maupun dalam *output* nasional telah tidak mampu menampilkan sektor jasa ini sebagai penyelamat ekonomi nasional Amerika Serikat. Sekelompok pemikir dan peneliti ekonomi yang menyelenggarakan The Berkeley Roundtable on the Internasional Economy di Universitas California, Berkeley secara tegas mengemukakan pemikiran ulang mengenai dasar teori transformasi struktural dalam proses perkembangan ekonomi. Dengan disponsori oleh Cohen dan Zysman, kelompok pemikir dan peneliti ekonomi

mengemukakan argumentasi bahwa perkembangan ekonomi hendaknya dipahami dan interpretasikan bukan hanya dalam konteks pergeseran struktural dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan kemudian ke sektor jasa. Tahap-tahap perkembangan ekonomi hendaknya dipahami dalam pengertian proses dinamika yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan inti (*core activities*) dan kegiatan-kegiatan pendukung (*supporting activities*). Dan kegiatan-kegiatan pendukung ini hendaknya dilihat apakah punya kaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan inti.

Menurut pemikiran baru ini, perkembangan ekonomi Amerika bukanlah diawali dengan landasan terjadinya pergeseran struktural dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dalam bentuk tenaga kerja dan *output* nasional, tetapi dilandasi oleh adanya proses yang mendorong peningkatan produktivitas di sektor pertanian secara luar biasa. Sektor pertanian secara sengaja telah dijadikan sebagai sektor inti (*core sector*). Sebagai sektor inti yang dinamis, sektor pertanian telah menjadi faktor utama yang mendorong ekspansi industri-industri hulu di sektor manufaktur seperti industri pupuk, kimia dan lain-lain dan juga sebagai utama yang mendorong ekspansi industri-industri hilir seperti industri-industri yang memproses bahan makanan. Sektor pertanian yang dinamis adalah juga merupakan pendorong utama bagi kegiatan perdagangan dan jasa-jasa. Keterkaitan sektor manufaktur dengan sektor pertanian yang telah didinamisasi secara luar biasa merupakan kunci pertumbuhan sektor manufaktur. Sebagai sektor inti berikutnya, sektor manufaktur ini menurut pandangan baru Berkeley ini hendaklah dikembangkan menurut model pengembangan sektor pertanian yaitu model yang didasarkan atas kesalingkaitan domestik. Dalam hal ini, Cohen dan Zysman mengemukakan: *Rather than shifting up and out of manufacturing by moving production 'off shore' and resorting to importing, manufacturing activities should be kept on home soil.* Menurut pandangan baru dari Berkeley ini mengenai teori transformasi struktural, sektor jasa-jasa bukanlah merupakan sektor inti dan oleh sebab itu tidak dianggap sebagai sektor yang mendinamisasi ekonomi. Sektor ini hanya merupakan sektor pendukung dan peranan ekonomis sektor ini tergantung kepada apakah sektor ini punya kaitan yang kokoh atau tidak dengan sektor-sektor inti yaitu sektor-sektor yang memproduksi barang nyata (*material production*).

Lebih lanjut pandangan ini mengemukakan bahwa apabila sektor-sektor ini mengalami kemunduran, maka sektor-sektor pendukungnya juga akan mengalami kemunduran. Ini terutama berlaku dalam situasi di mana terdapat ketergantungan *spatial* di antara kegiatan-kegiatan produksi dalam sektor-sektor inti ini. Agar supaya sektor-sektor inti tidak mengalami kemunduran kapasitas, maka perlu dikembangkan dalam sektor-sektor inti yaitu apa yang disebut *learning curve economies*. Ini hanya dapat diraih apabila pengembangan produk dan modifikasi-modifikasi dalam peralatan produksi secara terus-menerus berlangsung. Ini bermakna bahwa tanpa dinamika produksi ini, pergeseran yang masif tenaga kerja ke sektor jasa-jasa akan menimbulkan erosi terhadap proses akumulasi modal baik yang berbentuk *human capital*, *technical capital* maupun *social output*. Kalau tidak ada proses yang mencegah terjadinya pergeseran ini, maka struktur ekonomi akan terjadi *overconcentration* dalam sektor jasa-jasa dan menurunnya produktivitas sektor-sektor inti. Juga akan timbul situasi di mana kegiatan sektor keuangan akan semakin tidak punya hubungan dengan produksi barang. Sukses ekonomi hanya bersifat semu dan tidak riil. Akar-akar ekonomi menjadi kropos dan rusak.

Pandangan baru dari Berkeley mengenai pemahaman tentang proses perkembangan ekonomi dalam konteks dinamika transformasi struktural seperti yang diuraikan di atas, sebenarnya secara bebas telah dikemukakan oleh almarhum Professor Joan Robinson di Universitas Cambridge, Inggris pada tahun 1979. Bedanya ialah bahwa pandangan transformasi struktural ala Berkeley ditujukan untuk memecahkan persoalan ekonomi Amerika Serikat yang diguncang oleh defisit yang kronis dalam neraca transaksi berjalannya sedangkan pandangan transformasi struktural ala Cambridge khusus ditujukan untuk memecahkan persoalan keterbelakangan ekonomi di negara-negara dunia ketiga. Secara spesifik pemikiran transformasi struktural Cambridge meletakkan sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan dan sektor industri sebagai motor pembangunan dengan saling keterkaitan yang kokoh. Sebagai motor pembangunan, sektor industri adalah merupakan *offshoot* dari sektor pertanian.

## PENDEKATAN POLITIK MENGENAI PEMBANGUNAN

*Pendekatan Politik Mengenai Pembangunan* pada dasarnya adalah tinjauan mengenai pembangunan dari disiplin ilmu politik. Secara umum pembangunan dari sudut pandang disiplin ilmu politik adalah identik atau disebut sebagai pembangunan politik. Dalam bidang perbandingan sistem politik, terdapat demikian banyak pendekatan dan model di antaranya (Al-Buraey 1986:27-29):

1. Pendekatan legal-administratif, yang meletakkan pembangunan dalam pengertian rumusan konstitusional serta kemampuan untuk menjaga hukum serta ketertiban, efisiensi, rasionalitas, dan netralitas. Max Weber merupakan tokoh aliran ini.
2. Model sistem fungsional, seperti banyak dirumuskan oleh banyak ahli teori seperti: Talcott Parsons, Marion Levy, R. K. Merton, dan A. Radcliffe-Brown. Mereka menitikberatkan perhatian pada ketergantungan, kestabilan sosial, dan keseimbangan. Almond dan Coleman mungkin dapat dikatakan telah melahirkan karya cemerlang yang mewakili mazhab ini, yaitu *The Politics of Developing Area*, yang diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1960.
3. Pendekatan ekonomi, yang mensyaratkan terbentuknya modal dan prasarana ekonomi yang memadai sebagai syarat terpenting untuk mencapai pembangunan politik dan demokrasi yang stabil. W. W. Rostow dalam karyanya *The Stages of Economic Growth* (1960) dapat dikatakan sebagai pelopor aliran ini.
4. Model elit dinyatakan dalam karya Edward Shill yaitu *Political Development in the New States* (1965). Ia memperlihatkan bahwa tugas utama kelas penguasa di negara baru adalah “menutupi kesenjangan” antara aspirasi para intelektual yang jumlahnya sedikit, dengan massa yang jumlahnya banyak. Kelas penguasa menurut Shill, harus mampu mengatasi krisis nilai yang terjadi ketika masyarakat mulai mengayunkan langkah transisinya yang pertama dari tradisional ke modernitas. Serta harus mampu mengatur (memanipulasi) proses perubahan sosial, merumuskan sasaran, dan menjaga legitimasinya.
5. Pendekatan komunikasi yang ter-refleksikan pada karya Karl W. Deutsch: *Nationalism and Social Communication* (1953), dan Daniel Lerner: *The Passing of Traditional Society* (1958). Model

- atau pendekatan komunikasi ini menitikberatkan pada mobilisasi atau partisipasi, rasionalisasi, integrasi nasional dan pemilahan (differensialisasi), dan demokrasi atau *pembaratan*.
6. Model lembaga, yang menitikberatkan pada kapasitas organisasi sosial untuk mengadaptasi perubahan, terutama krisis-krisis politik dan ekonomi. Leonard Binder, William Foltz, Lloyd Fallers, dan Seymour Martin Lipset telah mengemukakan masalah-masalah ketidaksinambungan politik (*political discontinuity*), perubahan lembaga, dan integrasi politik, serta memandang bahwa perubahan sosial politik sebagai masalah proses yang harus dihadapi oleh elit yang memerintah.

Robert A. Packenham menawarkan suatu klasifikasi yang berbeda dengan pendekatan yang biasa dilakukan Barat terhadap kajian pembangunan politik. Ia memusatkan tipologinya pada berbagai kondisi yang oleh para ahli ilmu sosial politik dianggap sebagai penyebab utama atau determinan pembangunan politik. Packenham membuat pembedaan dari tujuh pendekatan, yaitu (Al-Buraey 1986:29-30):

1. Pendekatan legal formal, yang menekankan pada aspek legal formal dari konstitusi yang menjamin hal-hal sebagai berikut: persamaan di depan hukum, tertib hukum, pemilihan umum yang teratur dan rahasia, federalisme atau pemisahan kekuasaan, atau juga kedua-duanya.
2. Pendekatan ekonomi, yang memandang pembangunan dari kacamata ekonomi semata. Pembangunan politik terutama merupakan fungsi pembangunan ekonomi, yang bermaksud mencukupi kebutuhan materi rakyat, dan menciptakan keserasian antara aspirasi ekonomi dan kepuasan.
3. Pendekatan administratif, yang menekankan peranan sentral administrasi negara dan administrasi pembangunan dalam pembangunan politik, dan menitikberatkan pada "kapasitas administratif untuk melaksanakan hukum dan ketertiban secara efisien dan efektif, dan melaksanakan fungsi keluaran pemerintah secara rasional dan netral".
4. Pendekatan sistem sosial, yang memandang pembangunan politik sebagai "fungsi sistem sosial yang mewadahi partisipasi rakyat dalam proses politik dan pemerintahan di semua tingkatan; dan

menjembatani agar terjadi persatuan di antara agama, kasta, bahasa, suku, dan berbagai kelompok lainnya.

5. Pendekatan budaya politik, yang memandang pembangunan sebagai serangkaian “perilaku dan kepribadian yang memungkinkan anggota sistem politik untuk mendapatkan keleluasaan (privilege) ataupun memikul tanggung jawab dari proses demokrasi politik.”
6. Pendekatan geografis, yang menyatakan bahwa pembangunan politik dipengaruhi oleh faktor-faktor tanah dan geografis lainnya.
7. Pendekatan modernisasi bertahap, melihat pembangunan politik sebagai bagian dari seluruh proses modernisasi termasuk legal formal, ekonomi sosial, psikologis, ataupun administratif.

## KESIMPULAN

Dari berbagai uraian di atas dapat dituliskan suatu catatan akhir bahwa pembangunan adalah terlalu kompleks untuk hanya ditinjau secara ekonomis saja. Boleh dikatakan pembangunan pada dasarnya suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem idepoleksosbud secara keseluruhan menuju kehidupan yang “lebih baik” dan “lebih manusiawi”. Bagaimanapun yang jelas pembangunan adalah merupakan proses perubahan yang tidak akan pernah berhenti karena pembangunan pada dasarnya suatu konsep normatif yang menyiratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut Gandhi sebagai “realisasi potensi manusia”.

## PUSTAKA

- Al Buraey, Muhammad A., 1986. *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, terjemahan, Jakarta: Rajawali Press.
- Arief, Sritua dan Adi Sasono, 1984. *Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan dan Lembaga Studi Pembangunan.
- Arief, Sritua, 1993. *Pemikiran Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Riset Pembangunan.
- Bryant, Coralie dan Louise G White, 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Penerjemah Rusyanto I., Jakarta: LP3ES.
- Todaro, Michael P., 2000. *Economic Development*, 7<sup>th</sup> edition, USA: Addison Wesley Longman, Inc.